



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS SETIAWAN
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 657574

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.610.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m2/120 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/44 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 610.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	193.000.000
1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	20.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	519.345.623
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.342.345.623
III. HUTANG	Rp.	289.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.053.345.623

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.